Webinar Sosialisasi Hak Menyampaikan Pendapat *ala* Pelajar di SMKN 3 Salatiga

Kristina Roseven Nababan*
Nani Mediatati

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Satya Wacana

ARTICLE INFO

Article history:

Received 8-12-2020

Revised 8-12-2020

Accepted 2-2-2021

Key words:

Webinars, democracy, critical thinking, media literacy.

ABSTRACT

Participation is an important aspect of democracy as well as the rights of citizens. The implementation of participation is also practiced by students when the emergence of the Criminal Code Bill in 2019 and Omnibus Law in 2020. The purpose of this Community Partnership program is to socialize student-style democratic participation to students of SMK Negeri 3 Salatiga. The specific target to be achieved in this devotional activity is the understanding of the understanding of ethical democracy and the call to critical thinking through media literacy before giving aspirations in democracy. Outside of this activity is scientific publications in the form of Journals as well as posters on Instagram. The method of implementing activities in achieving the objectives of community service is to conduct a webinar on the zoom application with students of SMK Negeri 3 Salatiga.

ABSTRAK

Partisipasi merupakan aspek penting dari demokrasi sekaligus menjadi hak warga negara. Pelaksanaan partisipasi juga turut dipraktekkan oleh pelajar ketika munculnya RUU KUHP dan Omnibus Law pada tahun 2019 dan 2020. Tujuan dalam program Kemitraan Masyarakat ini yaitu untuk melakukan sosialisasi hak menyampaikan pendapat ala pelajar kepada siswa SMK Negeri 3 Salatiga. Target khusus yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian ini adalah pemahaman terhadap pemahaman demokrasi yang beretika dan ajakan berpikir kritis melalui literasi media sebelum memberikan aspirasi dalam berdemokrasi. Luaran dari kegiatan ini adalah publikasi ilmiah dalam bentuk Jurnal serta poster di Instagram. Metode pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian tujuan pengabdian kepada masyarakat adalah dengan melakukan webinar di aplikasi zoom dengan peserta siswa/i SMK Negeri 3 Salatiga.

* Corresponding author: kristina.nababan@uksw.edu

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan suatu perwujudan *check and balance* antara pemerintah dan masyarakat. Tingkat kemauan dan demokrasi suatu masyarakat memang ditentukan oleh semakin beragamnya aktivitas sosial, ekonomi, politik, budaya, serta keamanan. Semakin beragam aktivitas masyarakat mengharuskan penanganan aksi unjuk rasa sejalan dengan penguatan *civil society* dan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah. Namun, dalam pelaksanaan demokrasi yang dalam hal ini adalah unjuk rasa seringkali tidak dibarengi dengan rasionalitas yang tinggi serta memberikan aspirasi tanpa benar-benar memahami konteks permasalahan, aspirasi apa yang disampaikan serta harapan apa yang diinginkan.

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi dimana dalam berdemokrasi haruslah ada penyaluran segala masukan dan aspirasi dari masyarakat, sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam demokrasi. Maka salah satu rekayasa untuk menyulap kedaulatan rakyat dalam retorika kebebasan dalam demokrasi itu adalah demonstrasi. Demonstrasi bagi masyarakat manapun adalah pilihan wajar di era demokratisasi dan modernisasi seperti sekarang ini. Demonstrasi, walau dilakukan oleh pelajar, akan tetap bergema suaranya. Negeri ini sedang menderas demokratisasi, sehingga aspirasi tidak lagi kedap suara. Dengan berdemokrasi, mereka sedang menjalani laku orang dewasa dengan aspirasi yang layak didengar oleh orang yang usianya jauh diatas mereka, tidak terkecuali oleh pelajar sekolah sekalipun.

Fenomena keterlibatan pelajar dalam demonstrasi bukan hal baru. Pada demo 1998 banyak pelajar terlibat. Sedangkan di era Presiden Jokowi, kembali dirasakan ketika DPR dan pemerintah membahas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada September 2019. Dalam aksi peran pelajar menjadi sorotan ketika terjadi rusuh di depan Gedung DPR, Senayan. Setahun kemudian Para pelajar seakan kembali kompak bergabung dengan kalangan buruh dan mahasiswa dalam demo tolak Omnibus Law pada 8 Oktober 2020 yang dianggap tidak pro kepada masyarakat khususnya kaum buruh. Akibat demonstrasi yang dibereskan titik berujung anarkis, sejumlah pelajar juga turut diamankan. Pengamanan yang dilakukan oleh Polisi menangkap 7 orang diduga provokator pada 20 Oktober 2020. Pelajar yang berhasil diamankan berasal dari 3 orang admin WhatsApp Group (WAG) STM se-Jabodetabek, 3 admin grup Facebook se-Jabodetabek dengan jumlah pengikut lebih dari 21,000 anggota dan 1 admin Instagram.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Susanto mengungkapkan bahwa provokasi ajakan kepada khalayak untuk berdemonstrasi menentang Omnibus Law melalui media sosial sangat luar biasa. Varian media sosial yang tengah berkembang dan banyak diminati orang adalah *Facebook*, *Twitter*, *WhatsApp*, *Youtube*, dan sebagainya. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media *broadcast*, maka media sosial menggunakan internet. Dengan demikian, media sosial sebagai sarana komunikasi memiliki peran membawa orang (penggunanya) untuk berpartisipasi secara aktif dengan memberi kontribusi dan *feedback* secara terbuka, baik untuk membagi informasi maupun memberi respon secara *online* dalam waktu yang cepat. Provokasi itulah yang membangkitkan semangat para pelajar untuk ikut berdemonstrasi. Ia menyayangkan maraknya keterlibatan para pelajar dalam aksi-aksi

demonstrasi di tanah air yang seolah menjadi tren dengan tingkat keterlibatan yang meluas. Bila pada tahun lalu yang terlibat cuma pelajar STM dan SMK, dalam unjuk rasa menentang Omnibus Law Cipta Kerja, terlibat pula pelajar SMA, SMP, dan SD.

Jika diperhatikan aksi unjuk rasa dilakukan para pelajar cukup sebenarnya memiliki banyak resiko apalagi hal tersebut berpotensi adanya pihak luar memanfaatkan mereka. Keterlibatan pelajar dalam aksi unjuk rasa ini menjadi masalah baru dimana mereka bukan mau menyampaikan unjuk rasa, tetapi mau membuat kericuhan dengan membawa batu, bambu, dan benda-benda lainnya. Hal inilah yang harus diperhatikan karena kesalahan persepsi penggunaan demokrasi. Selain itu, demonstrasi adalah satu mekanisme yang tidak aman bagi anak dan segala kegiatan yang berpotensi terjadi kekerasan harus dijauhkan dari anak-anak.

Pergeseran budaya demonstrasi semakin diminati oleh pelajar sekolah. Oleh karena itu harus disikapi dengan bijak salah satunya dengan membangun budaya berpikir kritis. Budaya berpikir kritis sangat diperlukan karena tanpa adanya budaya berpikir kritis mengakibatkan generasi yang mudah terprovokasi oleh hal-hal yang belum tentu benar. Para pelajar sebaiknya diberi pemahaman mengenai poin yang diperjuangkan dan bagaimana sebaiknya menggunakan hak menyampaikan pendapat sebagai perwujudan negara demokrasi yang baik dan benar. Oleh karenanya tujuan webinar ini adalah supaya siswa/I SMK Negeri 2 Salatiga memahami pentingnya sosialisasi demokrasi dan budaya berpikir kritis yang menjadi salah satu media untuk memberikan pengetahuan bagaimana menggunakan hak demokrasi dan penggunaan media sosial dengan bijak, meredam hoax dan konten-konten yang berpotensi memecahkan persatuan dan kesatuan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui webinar menggunakan aplikasi zoom. Hal ini dikarenakan pandemi covid-19 yang mengharuskan *social distancing* dan melakukan sosialisasi virtual. Sehingga nilai-nilai, keterampilan, dan pengetahuan terinternalisasi dengan baik kepada siswa siswi SMK Negeri 3 Salatiga.

Metode pendekatan dalam kegiatan ini terbagi menjadi dua cara yaitu penjabaran pemahaman dan pengaplikasian sebagai berikut:

- a. Pemberian pengetahuan dan informasi mengenai hak menyampaikan pendapat ala pelajar.
- b. Pengaplikasian melalui webinar dengan melakukan kampanye media sosial oleh peserta.

Partisipasi mitra dalam pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, analisis permasalahan yang ditemui dalam penggunaan media sosial dan hubungannya dengan demokrasi di kalangan pelajar. Partisipasi mitra dalam pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat antara lain:

- 1) Ikut berpartisipasi dalam perencanaan kegiatan pendampingan antara lain membuat kesepakatan waktu untuk jadwal dan pelaksanaan webinar.
- 2) Berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan.

Metode Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh mitra pengabdian, maka solusi yang ditawarkan adalah pendekatan partisipatif dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosialisasi/diskusi dan produk kampanye demokrasi dan berpikir kritis oleh pelajar sebagai generasi milenial. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada pihak mitra, staf dan jajaranya dengan cara:

- a. Tim Pelaksana datang ke mitra pengabdian yaitu SMK Negeri 3 Salatiga dengan membuat kesepakatan jadwal dengan Kepala sekolah yaitu Ibu Ir. Nanik Sundari, M.M.
- b. Tim memberikan informasi tentang perlunya pemahaman etika berdemokrasi dan berpikir kritis dalam menyampaikan aspirasi.

2. Pengembangan Media Pembelajaran

Webinar yaitu seminar web/online yang dilakukan dengan mengajak peserta untuk memberikan pemahaman dan solusi yang berkaitan dengan fenomena yang berhubungan dengan demokrasi dan berpikir kritis yang sebenarnya dengan maksud untuk memperoleh sebuah pengalaman dan pengetahuan baru. Sehingga dapat dikatakan melalui Webinar terjadi sharing informasi dari pemateri kepada para peserta. Hal tersebut merupakan satu interaksi yang terus menerus dalam satu kegiatan hingga terjadinya proses perubahan kreatif yang diprakarsai oleh peserta. Kegiatan webinar ini dilakukan dalam dua kali pertemuan yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Pertemuan pertama dilakukan oleh tim pelaksana sebagai pendamping mitra membantu sekolah menganalisis permasalahan yang ditemukan dalam pemahaman penggunaan teknologi dan demokrasi serta menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Hasil analisis permasalahan tersebut akan dituangkan ke dalam latar belakang penulisan program kemitraan masyarakat sampai dengan metode pelaksanaan sebagai cara mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh mitra pengabdian.
- b. Pertemuan ke dua dilakukan berdasarkan hasil pelaksanaan tindakan dalam menganalisis permasalahan mitra. Webinar yang akan dilakukan adalah webinar sosialisasi hak menyampaikan pendapat *ala* pelajar yang membahas secara mendalam mengenai demokrasi. Dalam kegiatan ini ada partisipasi mitra dalam pelaksanaan program, baik melalui partisipasi aktif dalam setiap kegiatan maupun sumber pendanaan (meskipun tidak grant) terutama berkaitan dengan pemanfaatan media social Instagram sebagai wadah diskusi/simulasi sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk sewa tempat.

3. Evaluasi Pelaksanaan Program

Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui tanggapan dari peserta webinar yakni SMK Negeri 3 Salatiga sebagai mitra tentang dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Evaluasi dilakukan dengan:

- a. Dengan cara peserta diberikan satu contoh pelaksanaan demokrasi yang beredar di sosial media kemudian peserta disuruh menganalisis apakah

- penyampaian aspirasi sudah sesuai dengan etika berdemokrasi serta sudah memahami konteks aspirasi apa yang sedang disampaikan di Indonesia.
- b. Peserta diharapkan dapat memberikan ajakan kepada pelajar lain untuk mengkampanyekan berpikir kritis dan berdemokrasi melalui media sosial masing-masing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Webinar atau web seminar merupakan suatu kegiatan pertemuan (seminar yang dilakukan secara daring atau memanfaatkan jaringan internet dan dapat diikuti oleh beberapa orang dari berbagai lokasi yang berbeda. Pelaksanaan webinar umumnya sama dengan pelaksanaan seminar konvensional dimana kegiatan ini dapat ditentukan oleh penyelenggara. Hal tersebut juga dilaksanakan dalam kegiatan ini dimana sosialisasi dilakukan dengan jarak jauh dengan peserta mitra pengabdian.

Melalui proses sosialisasi yang dilaksanakan, maka diperoleh bahwa banyaknya peserta yang belum memahami hak berekspresi dan menyampaikan pendapat ala pelajar karena sosialisasi yang pernah dilakukan hanya terfokus kepada pemberian hak suara dalam pemilu dimana peserta adalah calon pemilih pemula ketika telah genap berusia 17 tahun. Selain itu, pelaksanaan sosialisasi ini juga membantu peserta untuk menerapkan budaya berpikir kritis dalam penggunaan internet maupun media sosial sebagai salah satu wadah penyampaian aspirasi yang paling dekat dengan pelajar.

Penggunaan internet dalam hal ini adalah media sosial tidak dapat dibendung ataupun dilarang. Hal ini dikarenakan akses atas internet adalah hak dasar bagi setiap orang dan dilindungi oleh undang-undang. Pada 27 Juni 2016, Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi yang menegaskan pentingnya promosi, proteksi, dan penikmatan hak asasi manusia atas internet yang menekankan bahwa akses atas internet menjadi hak setiap orang sehingga harus dijamin dan dilindungi. Oleh karenanya, dalam sosialisasi ini diberikan pemahaman atas penggunaan internet bukan memberikan larangan.

Dalam webinar ini, peserta sangat sering berselancar di dunia maya. Hal ini dapat dilihat dari hasil polling saat webinar berlangsung, diperoleh hasil bahwa seluruh peserta memiliki perangkat yang bisa terhubung dengan internet dan seluruh peserta memiliki media sosial. Dari hasil polling yang dilakukan pula, penggunaan media sosial yang paling sering digunakan adalah Whatsapp dengan rata-rata penggunaan hampir 13 jam/ harinya.

Diagram 1. Penggunaan media social oleh SMKN 2 Salatiga

Kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh konstitusi seringkali dijadikan alasan untuk menggunakan media social sebagai alat untuk menyampaikan aspirasi yang terkadang bablas. Dari hasil kegiatan juga ditemukan bahwa Instagram menjadi salah satu platform yang paling sering menyajikan berita hoax (berita palsu) ataupun disinformasi.

Kategori berita palsu dapat berupa: (a) fabrikasi, konten buatan, dimana konten 100% salah dan dirancang untuk menipu dan membahayakan; (b) manipulasi, informasi atau keaslian dimanipulasi untuk menipu; (c) imposter content, yakni tatkala sumber asli ditiru; (d) Konteks salah atau palsu (false context), konten asli dibagikan dengan informasi kontekstual palsu; (e) Konten yang menyesatkan (misleading content), yakni menyesatkan informasi untuk membingkai peristiwa atau fakta; (f) Koneksi salah (false connection), yakni tindakan ketika informasi tak mendukung konten; (g) Satire atau parodi: Tidak ada niat untuk melukai, tetapi ada potensi untuk dikesankan menipu.

Jika diperhatikan, Instagram berada di posisi kedua setelah whatsapp yang paling sering dikunjungi oleh pelajar, dimana akan memberikan dampak yang besar bagi penerima informasi khususnya pelajar. Sehubungan dengan hal tersebut, dari webinar ini juga ditemukan bahwa media sosial dianggap sangat berpengaruh terhadap tindakan peserta untuk melakukan tindakan unjuk rasa baik ketika isu RUU KUHP tahun 2019 maupun isu Omnibus Law pada tahun 2020.

Dengan banyaknya fenomena penggunaan media social sebagai salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan aspirasi, melalui webinar ini diberikan sosialisasi bagaimana cara menyampaikan pendapat dan ekspresi yang baik dan benar, serta bekal mendalam atas demokrasi yang baik dan mencegah ada aksi unjuk rasa yang kontraproduktif dan anarkis.

Narasumber yang terlibat dalam webinar sosialisasi hak menyampaikan pendapat ala pelajar kepada siswa SMK Negeri 2 Salatiga yaitu:

1. Dra. Nani Mediatati, M.Pd (Sebagai narasumber yang memberikan materi mengenai penerapan hak berpendapat ala pelajar dimana hasil yang

diharapkan peserta webinar memahami tentang pelaksanaan demokrasi yang baik dan benar)

2. Kristina Roseven Nababan, S.Pd., M.Han (sebagai narasumber yang memberikan materi mengenai literasi media *ala* pelajar sebagai langkah menangkal hoax dimana hasil yang diharapkan peserta webinar mampu berpikir kritis dalam menghadapi isu-isu yang sedang berkembang khususnya di media sosial sebelum memberikan pendapat).

Kegiatan ini juga melibatkan beberapa mahasiswa sebagai MC (Oktavyana Damanik), sebagai operator (Alesandro Yosaphat) dan konten media sosial (Bagas Setiadi). Untuk melihat seberapa jauh pemahaman peserta dalam webinar diberikan satu contoh pelaksanaan demokrasi yang beredar serta penyebaran hoax yang mendorong munculnya demonstrasi di media sosial kemudian peserta diminta menganalisis apakah penyampaian aspirasi sudah sesuai dengan etika berdemokrasi di Indonesia. Hasil dari kegiatan ini peserta mendapatkan pemahaman terhadap penggunaan hak menyampaikan aspirasi yang sesuai dengan etika serta mampu menganalisis sebuah fenomena apakah sesuai dengan fakta atau tidak.

Setelah melakukan kegiatan diskusi, maka berikutnya dilakukan pendampingan dalam membuat poster di media sosial yang berisikan kampanye ajakan untuk berdemokrasi sesuai dengan etika dan berpikir kritis dalam penerimaan informasi dari media sosial sebagai salah satu upaya menyebarkan pengetahuan yang telah didapatkan oleh peserta.

SIMPULAN

Webinar sosialisasi hak menyampaikan pendapat *ala* pelajar kepada siswa SMK Negeri 3 Salatiga yang telah dilaksanakan mampu meningkatkan pemahaman serta pengalaman dan pengetahuan baru bagaimana cara menggunakan hak menyampaikan pendapat yang baik dan beretika dimasa kebebasan berekspresi hampir sulit untuk dibatasi karena bantuan teknologi. Selain itu mitra memperoleh pemahaman dalam mengidentifikasi ancaman-ancaman di dalam proses demokrasi dan penggunaan media sosial sebagai sarana penyampaian aspirasi. Saran dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah dapat dilakukan kegiatan webinar berseri sesuai dengan topik yang sedang hangat di kalangan pelajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ibrahim. 2020. "Demonstrasi Pelajar Dijamin UU, Dibayangi Kekerasan Aparat". Dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191121100443-20-450213/demonstrasi-pelajar-dijamin-uu-dibayangi-kekerasan-aparat>.
- Ahmad, Azhar dan Jayum Jawan. 2017. Krisis Kewenangan dan Tindakan Balas Pelajar : Berakhirnya Pemerintahan Orde Baru. *E-Bangi Jurnal*. Vol. 14. No. 12.
- Indrakrista, Niti Bayu. 2015. Pers Mengawal Demokrasi Daerah: Analisis Pemberitaan Implementasi Dana Keistimewaan di Harian Tribun Jogja. *Jurnal Ilmu Sosial*

- dan Ilmu Politik*. Vol. 18, No. 3. Hal. 196-209.
- Panadji, Tri. 2008. Aksi Unuk Rasa (dan Radikalisme Serta Penanganannya dalam Demokrasi di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Vo. 26. No. 2. Hal. 132-143.
- Probolinggo, Kontributor dan Ahmad Faisol. 2020. "Pelajar yang Ikut Demonstrasi Akan Dapat Sanksi dari Sekolah, Namanya Dicatat Polisi". dalam <https://Regional.Kompas.Com/Read/2020/10/16/15154851/Pelajar-Yang-Ikut-Demonstrasi-Akan-Dapat-Sanksi-Dari-Sekolah-Namanya-Dicatat?Page=All>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Winarno, Sugeng. 2019. "Demokrasi, Demonstrasi dan Demo Crazy". Rabu, 25 September 2019. *Malang Post*. Hal. 14.

LAMPIRAN

Gambar 1. Koordinasi dan Persiapan Kegiatan

Gambar 2. Narasumber pertama memberikan materi

Gambar 3. Narasumber kedua memberikan materi

Gambar 4. Konten kampanye di media sosial